

RENCANA KERJA (RENJA) RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini Renja RSUD Puri Husada Tembilahan yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan dan Renstra BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit kedepan, dengan harapan semua rencana dapat terpenuhi sesuai dengan prioritas kebutuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Agustus 2024

DIREKTUR

RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN



dr. RAHMAT SUSANTO

NIP. 19710105 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA PD.....	39
3.3. Program Dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD RSUD Puri Husada	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja PD Kabupaten Indragiri Hilir	18
Tabel 2.3 Analisis Strategi dengan Faktor SWOT	25
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	27
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir	32
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Indragiri Hilir	41
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai dokumen perencanaaan daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir mengintegrasikan dengan rancangan Renstra-SKPD dan dijabarkan dalam Renja-PD, serta masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pada Tahun 2025 Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dengan Tema **“Penguatan Perekonomian Daerah Yang Mandiri dan Berkelanjutan”** dengan salah satu prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pemerataan Kualitas layanan Kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Kelas C dengan 259 Tempat Tidur, berstatus BLUD dengan tingkat akreditasi Paripurna, merupakan salah satu rumah sakit yang memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai Institusi pemberi pelayanan

kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistik mengantisipasi perkembangan kesehatan masa depan.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Puri Husada Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Rumah Sakit dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dan sasaran RSUD Puri Husada Tembilahan. Dengan demikian Renja RSUD Puri Husada Tembilahan mensinergikan perencanaan pembangunan Rumah Sakit melalui program-program kesehatan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - o. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis OPD 2024-2026;
 - p. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- q. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tahun 2025 difungsikan sebagai dokumen resmi bagi Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, dalam merencanakan Pelayanan yang bermutu, berkualitas yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

b. Tujuan

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan bidang kesehatan khususnya RSUD Puri Husada Tembilahan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan.
- 2) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan khususnya RSUD Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan khususnya RSUD Puri Husada Tembilahan saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Unit, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Serta program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi mengenai Program dan Kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaannya

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Puri Husada untuk mengukur tercapainya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) RSUD Puri Husada menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Beberapa faktor penyebab, penghambat, implikasi yang timbul dan kebijakan yang perlu diambil terhadap Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang serapan anggarannya rendah sehingga berakibat tidak terpenuhinya target yang akan dicapai yaitu :

- a. Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian sebesar 17 Orang dari target sebesar 20 Orang atau sebesar 85%
- b. Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian sebesar 229 Orang dari target sebesar 229 Orang atau sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian sebesar 229 Orang dari target sebesar 229 Orang atau sebesar 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian sebesar 200 Jam dari target sebesar 200 Orang atau sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian sebesar 19 Paket dari target sebesar 19 Paket atau sebesar 100%
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian sebesar 5 Paket dari target sebesar 5 Paket atau sebesar 100%
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian sebesar 10 Laporan dari target sebesar 10 Laporan atau sebesar 100%
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian sebesar 120 Rekening dari target sebesar 120 Rekening atau sebesar 100%
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian sebesar 192 Orang dari target sebesar 192 Orang atau sebesar 100%
- 9) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan capaian sebesar 1 Unit dari target sebesar 1 Unit sebesar 100%

- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dengan capaian sebesar 45 Jenis dari target sebesar 45 Jenis atau sebesar 100%
 - 11) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis pakai dengan capaian sebesar 1 Paket dari target sebesar 1 Paket atau sebesar 100%
 - 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dengan capaian sebesar 100 Orang dari target sebesar 100 Orang atau sebesar 100%
 - 13) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan capaian sebesar 100 Persen dari target sebesar 100 Persen atau sebesar 100%
 - 14) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian sebesar 20 Dokumen dari target sebesar 20 Dokumen atau sebesar 100%
- c. Tidak terdapat realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :
- 1) Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program/kegiatan :
 - a) Perencanaan Kinerja dan Penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
 - b) Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 2) Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik segi fisik maupun anggaran.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang hingga awal Tahun 2023 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian disesuaikan kembali Program Kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan. Maka terjadi Perubahan Indikator kinerja dan Target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan Kondisi yang ada.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- Penyesuaian target capaian pada Tahun 2023
- Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
- Efisiensi alokasi belanja

- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun berjalan) di RSUD Puri Husada Tembilahan dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : RSUD Puri Husada Tembilahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1 02 02	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	100	100	100	100	100	100	100	100
1 02 02 2.01	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Sarana, prasarana dan penunjang medik sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100

1 02 02 2.01 16		1.1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	45	45	1	1	100	1	1	2,22
1 02 02 2.01 17		1.1.5	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
1 02 02 2.02	1.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
1 02 02 2.02 12		1.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi HIV	100	100	100	100	100	100	300	300
1 02 02 2.02 25		1.2.2	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Operasional Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular yang tersedia	1	100	100	100	100	100	100	10000
1 02 05	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	100	0	0	0	100	100	100
1 02 05 2.01	2.1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan	100	100	100	100	100	100	70,67	70,67
1 02 05 2.01 01		2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Orang yang dilakukan promkes di Rumah Sakit	150	45	20	20	100	0	0	0,00
1 02 01	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
1 02 01 2.01	3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

1 02 01 2.01 06	3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	0	0	0	0	6	6	100
1 02 01 2.02	3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	100	100
1 02 01 2.02 01	3.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223	229	229	229	100	229	687	308
1 02 01 2.05	3.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	67	67
1 02 01 2.05 09	3.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500	315	20	20	100	0	335	67,00
1 02 01 2.06	3.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
1 02 01 2.06 01	3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19	29	19	19	100	47	95	500
1 02 01 2.06 04	3.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100

1 02 01 2.06 09		3.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	181	10	10	100	10	201	100,5
1 02 01 2.08	3.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100							
1 02 01 2.08 02	3.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120	120	120	120	100	120	120	100
1 02 01 2.08 04	3.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	192	192	192	192	100	192	192	100
1 02 01 2.10	3.6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan Pelaksanaan BLUD	100							
1 02 01 2.10 01	3.6.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100

Evaluasi Program Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Sistem penganggaran Tahun 2023 RSUD Puri Husada Tembilahan terbagi menjadi Anggaran APBD dan BLUD. APBD sebesar Rp 44.952.790.393,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 42.334.846.357,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,00 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,18 %. Sedangkan dari penganggaran BLUD sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 71.518.458.313,77 dengan capaian kinerja fisik sebesar 122,31 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 119,20 % pada penganggaran BLUD ini terdapat kelebihan Capaian Realisasi hal ini dikarenakan penggunaan Ambang Batas 2023 dan SiLPA BLUD 2022, jadi keseluruhan program dan kegiatan dengan pagu Rp.104.952.790.393,00 terealisasi sebesar Rp. 113.853.304.670,77 capaian kinerja fisik 108,66 % dan capaian kinerja keuangan 108,48 %. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dari pagu anggaran Rp. 60.000.000,00

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Untuk Tahun berjalan, RSUD Puri Husada Tembilahan telah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Anggaran Tahun 2024 sebesar

Rp. 80.705.255.132,00 terdapat 2 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan berisikan capaian kinerja pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan berdasarkan Indikator Sasaran Renstra 2024-2026. Indikator Sasaran RSUD Puri Husada Tembilahan yaitu:

- Cakupan Elemen Penilaian Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	AA	-	B	B	BB	BB	A	BB	n/a	BB	BB	Sesuai Indikator Renstra Tahun 2024-2026
2	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	A	-	B	B	B	BB	A	B	n/a	n/a	n/a	Sesuai Indikator Renstra Tahun 2024-2026
3	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	-	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Sesuai Indikator Renstra Tahun 2024-2026
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30	-	77,00	77,50	88,30	90	95	78,59	78,16	80,45	90	Sesuai Indikator Renstra Tahun 2024-2026

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Puri Husada menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang non medik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

a. Isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD terbagi menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal:

1. Faktor Internal

a) Jumlah dan kualitas SDM

- Mengikuti pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan,
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan Kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

b) Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit

Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan Kelas Rumah Sakit

c) Motivasi pegawai

Pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi pegawai sehingga memotivasi kerja di masing-masing bagian dapat ditingkatkan

d) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga kabupaten Indragiri Hilir menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan, hal ini berimbang kepada pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Puri Husada, kurangnya anggaran ini harus disiasati dengan kreativitas dan inovasi sehingga RSUD masih mampu memberikan pelayanan yang optimal.

2. Faktor Eksternal

a) Berkembangnya pelayanan kesehatan alternatif

- b) Faktor geografis, jauh dari provinsi, dan daerah rawa
- b. Tantangan dan Peluang
- Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.
- Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada RSUD Puri Husada Tembilahan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan wajib kesehatan dalam lima tahun mendatang.

a) Kekuatan (Strength)

Beberapa faktor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

 - 1) Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kesehatan menuju ke arah yang lebih baik, sebagai contoh masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan program-program kesehatan dan memberikan kepercayaan kepada RSUD Puri Husada

Tembilahan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

- 2) Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur RSUD Puri Husada Tembilahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi yang disandang masing-masing staf, meskipun dengan penganggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang minim.

b) Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya tenaga profesional dan terlatih yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal misalnya pada kasus-kasus tertentu baik diurus kesehatan maupun diurus Teknologi Informatika (TI).
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar RSUD Puri Husada Tembilahan yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah:

a. Peluang (opportunities)

- 1) Kemitraan antara pemerintah yaitu RSUD Puri Husada Tembilahan dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan di RSUD Puri Husada Tembilahan.
 - 2) Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan.
- b. Ancaman (Threats)
- 1) Adanya Rumah Sakit Swasta, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan swasta yang merupakan pesaing dan jumlahnya cenderung meningkat.
 - 2) Letak geografis RSUD Puri Husada Tembilahan yang terletak di ujung provinsi riau sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat mencari atau mendapatkan Pelayanan Kesehatan diluar dai Kabupaten Indragiri Hilir atau daerah perbatasan terdekat.

3. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
- 1) Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada

untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesehatan masyarakat.

2) Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan.

b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :

1) Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan memenuhi standar Pelayanan Kesehatan.

2) Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan.

c. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :

1) Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan Kesehatan.

2) Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :

- 1) Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna sehingga meningkatkan produktifitas masyarakat.
- 2) Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan Pelayanan Kesehatan.

Tabel 2.3
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

	INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
EKSTERNAL		<p>Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kesehatan menuju ke arah yang lebih baik, sebagai contoh masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan program-program kesehatan dan memberikan kepercayaan kepada RSUD Puri Husada Tembilahan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.</p> <p>Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur RSUD Puri Husada Tembilahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi yang disandang masing-masing staf, meskipun dengan penganggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang minim.</p>	<p>Terbatasnya tenaga profesional dan terlatih yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal misalnya pada kasus-kasus tertentu baik diurus kesehatan maupun diurus Teknologi Informatika (TI).</p> <p>Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan.</p>
PELUANG (O)		<p>STRATEGI S + O</p> <p>Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesehatan masyarakat.</p> <p>Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan.</p>	<p>STRATEGI W + O</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan Kesehatan. ▪ Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
TANTANGAN (T)		<p>STRATEGI S + T</p> <p>Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan memenuhi standar Pelayanan Kesehatan.</p> <p>Manfaatkan semangat dan motivasi aparatur agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan.</p>	<p>STRATEGI W + T</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna sehingga meningkatkan produktifitas masyarakat. ▪ Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan Pelayanan Kesehatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Puri Husada Tembilahan. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini membuat informasi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah disusun oleh RSUD Puri Husada Tembilahan merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2024.

Pada Bab ini memuat tentang proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan Tahun 2025.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : RSUD Puri Husada Tembilahan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100%	97.677.534.252	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100%	97.677.534.252	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	22 Nilai	1.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	22 Nilai	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	6	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	6	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan	90%	5.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan	90%	5.500.000	

			Satuan:PERSEN					Satuan:PERSEN			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	30	5.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	30	5.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Terpenuhinya Administrasi Umum Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase)	60%	4.258.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Terpenuhinya Administrasi Umum Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase)	60%	4.258.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	47	1.068.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	47	1.068.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	30	3.190.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	30	3.190.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	60%	7.666.776.252	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	60%	7.666.776.252	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	120	1.281.945.612	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	120	1.281.945.612	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Puri Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	192	6.384.830.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Puri Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	192	6.384.830.640	

		Tembilahan	Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)				Tembilahan	(Dengan Satuan:Laporan)			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	93%	90.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	93%	90.000.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	90.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	90.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100	4.410.004.980	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100	4.410.004.980	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	97	4.395.974.980	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	97	4.395.974.980	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana endukungnya	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	1	1.919.600.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana endukungnya	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	1	1.919.600.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	700.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	700.000.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	RSUD Puri Husada	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	3	1.776.374.980	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	RSUD Puri Husada	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	3	1.776.374.980	

	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tembilahan	Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tembilahan	Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan (Dengan Satuan:Persen)	100	14.030.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan (Dengan Satuan:Persen)	100	14.030.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	100	14.030.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	100	14.030.000	
			Jumlah	129.857.850.980				Jumlah	129.857.850.980		

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

RSUD Puri Husada melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kebutuhan yang telah diprioritaskan dan disesuaikan dengan Ketersediaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari pelaksana, user dokter sebagai pengguna operasional maupun dari hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan forum Perangkat Daerah yang lansgugn ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang dan tugasnya membantu kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah di bidang kesehatan dengan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan, berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang disulkan para pemangku kepentingan, baik dari pelaksana, user dokter sebagai pengguna operasional maupun dari hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah. Berikut adalah tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : RSUD Puri Husada Tembilahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100%	97.677.534.252
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	22 Nilai	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	6	1.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai	90%	1.100.000.000

			standar (Dengan Satuan:PERSEN)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	30	5.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase)	60%	4.258.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	47	1.068.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	30	3.190.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	60%	7.666.776.252
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	120	1.281.945.612

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	192	6.384.830.640
	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	93%	90.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Puri Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	90.000.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100	4.410.004.980
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	97	4.395.974.980
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana endukungnya	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	1	1.919.600.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	700.000.000

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	1.776.374.980
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Puri Husada Tembilahan	Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan (Dengan Satuan:Persen)	100	14.030.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	100	14.030.000
				Jumlah	129.857.850.980

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Kebijakan Nasional terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan melihat pada kebijakan sesuai Rencana Program Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 adalah “INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap

memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable), meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya; adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan teals dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan kebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional; adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan system kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Inhil
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Inhil
- b. Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

1. Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Tugas dan Fungsi RSUD Puri Husada Tembilahan
2. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), masuknya modal dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri.
3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk mempercepat program SDGs
4. Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
5. Peningkatan Kelas Rumah Sakit (Kelas B)

Untuk mewujudkan faktor – faktor tersebut diatas RSUD Puri Husada Tembilahan merumuskan beberapa Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang sangat prioritas untuk meningkatkan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut yaitu rumusan rencana program

RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas merupakan program yang sangat diperlukan RSUD Puri Husada Tembilahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Adapun rumusan Program, kegiatan dan Sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
 Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : RSUD Puri Husada Tembilahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4							5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	100%	97.677.534.252	PAD		100	118.957.439.066
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	22 Nilai	1.000.000	PAD		22 Nilai	37.108.750
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	Laporan	RSUD Puri Husada Tembilahan	6	1.000.000	PAD		12 Laporan	37.108.750

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	90%	1.100.000.000	PAD		90	143.448.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Orang	RSUD Puri Husada Tembilahan	30	5.500.000	PAD		1022	143.448.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Administrasi Umum Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	60%	4.258.000	APBD		60	548.189.928
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	RSUD Puri Husada Tembilahan	47	1.068.000	APBD		47	172.475.928
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	RSUD Puri Husada Tembilahan	30	3.190.000	APBD		46	175.714.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	60%	7.666.776.252	APBD		60	9.408.380.640
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	RSUD Puri Husada Tembilahan	120	1.281.945.612	APBD		1	3.253.350.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	RSUD Puri Husada Tembilahan	192	6.384.830.640	APBD		2	6.155.030.640
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	93%	90.000.000.000	APBD		93	80.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Unit Kerja	RSUD Puri Husada Tembilahan	1	90.000.000.000	APBD		32	80.000.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	100	4.410.004.980	APBD		100	9.968.546.250
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	97	4.395.974.980	APBD		97	9.954.516.250
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana endukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	Unit	RSUD Puri Husada Tembilahan	1	1.919.600.000	APBD		1	3.500.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan	Unit	RSUD Puri Husada Tembilahan	1	700.000.000	APBD		1	1.000.000.000

		Satuan:Unit)							
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	RSUD Puri Husada Tembilahan	3	1.776.374.980	APBD	30	4.954.516.250
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan (Dengan Satuan:Persen)	Persen	RSUD Puri Husada Tembilahan	100	14.030.000	APBD	100	14.030.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	Orang	RSUD Puri Husada Tembilahan	100	14.030.000	APBD	17440	14.030.000
						129.857.850.980			137.358.321.152

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini menjadi prioritas dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RSUD Puri Husada Tembilahan, sehingga sangat berpengaruh pada peningkatan pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan, jika terdapat program dan kegiatan yang tidak terdapat anggaran maupun tidak dijalankan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program prioritas disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah diprioritaskan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan. Program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)			RSUD Puri Husada Tembilahan	100%			97.677.534.252	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	RSUD Puri Husada Tembilahan			22 Nilai	1.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)		RSUD Puri Husada Tembilahan		6		1.000.000	APBD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	RSUD Puri Husada Tembilahan			90%	1.100.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		RSUD Puri Husada Tembilahan		30		5.500.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase)	RSUD Puri Husada Tembilahan			60%	4.258.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		RSUD Puri Husada Tembilahan		47		1.068.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		RSUD Puri Husada Tembilahan		30		3.190.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	RSUD Puri Husada Tembilahan			60%	7.666.776.252	APBD

				(Dengan Satuan:PERSEN)						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		RSUD Puri Husada Tembilahan		120		1.281.945.612	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		RSUD Puri Husada Tembilahan		192		6.384.830.640	APBD
	Peningkatan Pelayanan BLUD			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	RSUD Puri Husada Tembilahan			93%	90.000.000.000	BLUD
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)		RSUD Puri Husada Tembilahan		1		90.000.000.000	BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal			RSUD Puri Husada Tembilahan	100			4.410.004.980	APBD
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan	RSUD Puri Husada Tembilahan			97	4.395.974.980	APBD

				UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)						
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana endukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)		RSUD Puri Husada Tembilahan		1		1.919.600.000	APBD
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		RSUD Puri Husada Tembilahan		1		700.000.000	APBD
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		RSUD Puri Husada Tembilahan		3		1.776.374.980	APBD
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan (Dengan Satuan:Persen)	RSUD Puri Husada Tembilahan			100	14.030.000	APBD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		RSUD Puri Husada Tembilahan		100		14.030.000	APBD
								Jumlah	129.857.850.980	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tembilahan yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar RSUD Puri Husada Tembilahan serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten seiring dengan peningkatan pelayanan menuju Kelas B
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat;

5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan, accountability system, supporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;
6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan RSUD Puri Husada Tembilahan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja dapat terukur dan berkesinambungan.

